

■ Direktur Seroja Membedel (bagian 2)

Pansus KP Endus Indikasi Tipikor

PANITIA Khusus (Pansus) Khatulistiwa Plaza (KP) menduga terjadi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengakibatkan Pemkot Pontianak mengalami kerugian cukup banyak setiap tahunnya.

"Tidak menutup kemungkinan ada Tipikor dalam kasus KP ini. Tetapi kita masih mengumpulkan data," kata Drs Erick S Martio SH MM, Ketua Pansus KP ditemui usai berkunjung ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, kemarin (3/11).

Kunjungan Pansus KP ke BPK-RI tersebut, merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan tanggapan yang berguna sebagai bahan masukan dalam menguak dugaan Tipikor. "BPK tidak memberikan kesimpulan, tetapi hanya memberikan masukan agar menambah wawasan Pansus, apa saja yang bisa menjadi Tipikor," jelas Erick.

Dengan kata lain, kepergian Pansus KP ke BPK-RI kemarin hanya bersifat sharing pendapat bukan mengambil kesimpulan terhadap kasus yang mengendap itu.

"Jadi ini secara sharing pendapat, bukan menyimpulkan," tegasnya Erick

Dari sharing pendapat dengan BPK-RI itu, Erick mengemukakan, terdapat beberapa hal yang membuat semakin kuatnya dugaan adanya Tipikor dalam kasus KP.

Di antaranya mengenai perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan perpanjangan. "Dari kedua ranah hukum ini, akan ditelusuri, apakah terdapat kerugian

■ Halaman 7

Pansus KP

negara, konspirasi, persengkongkolan atau lainnya," jelas Erick.

Belum lagi mengenai pertimbangan, kenapa KP itu tidak dikelola Pemkot Pontianak. Padahal, bila hal tersebut dilakukan, tentunya keuangan daerah akan lebih baik ketimbang dikelola pihak ketiga. "Apalagi adanya wewenang pengelola memungut biaya lebih tinggi jauh dari yang dibayarkan ke kas Pemkot Pontianak," kata Erick.

Nilai yang lebih tinggi ditetapkan PT Seroja tersebut, tambah Erick, di antaranya mengenai sewa kios yang dibebankan kepada para pedagang. "Kalau itu dikelola Pemkot, ditarik Rp 500 ribu saja per bulan, jauh lebih besar dampaknya pada kas daerah. Makanya kita pertanyaan apa yang diperoleh Pemkot selama ini dari kerjasama itu," ujarnya. Terkait persoalan itu, kata Erick, Pansus KP juga memanggil Mantan Walikota Pontianak, dr Buchary A Rahman. Karena perjanjian antara Pemkot Pontianak dengan PT Seroja itu

berlangsung pada zamannya menjadi kepala daerah. "Kita akan tanya kepada Buchary apakah kontribusi terhadap APBD dari panjangnya masa perjanjian itu, padahal sementara dinilai cukup merugikan Pemkot," katanya.

Sementara itu, Pansus KP juga akan melayangkan surat panggilan ketiga atau terakhir kepada Direktur PT Seroja Plaza Developer. "Kita akan layangkan surat pemanggilan ketiga, rencananya Jumat depan (5 November)," ungkap Erick. Kalau pun pada panggilan ketiga ini Bambang masih tidak hadir, Pansus KP akan melibatkan aparat berwenang untuk melakukan pemanggilan secara paksa. "Kita akan meminta polisi untuk memanggil paksa," tegas Erick. Masih juga tidak bisa memenuhi panggilan tersebut, kata Erick, berarti Bambang Wijanarko mengakui dan membenarkan rekomendasi Pansus KP di masa mendatang. "Sama saja dia membenarkan rekomendasi atau kesimpulan dari kita, bisa

..... dari halaman 1

saja rekomendasi itu ditemukannya penipuan, perjanjian tidak sah, korupsi atau lainnya, itu merupakan hak Pansus KP," ingatnya. Menurut Erick, kalau memang Bambang merasa benar terhadap perbuatannya selama ini, tentunya dia akan memberikan keterangan. "Kita tidak mau mendengar sepihak, kita mau mendengar penjelasan dari semua pihak, agar rekomendasi Pansus kelak benar-benar tepat," katanya.

Erick mengatakan, pemanggilan terhadap Bambang bukan berarti Pansus menjadikannya seperti tersangka. "Kita mau meminta penjelasan dan keterangan, bukan menganggapnya sebagai tertuduh," terangnya.

Tetapi, tegas Erick, kehadiran Bambang ini tidak boleh diwakilkan, karena dia yang memberikan keputusan bukan yang lainnya. "Kita mencoba untuk mengklarifikasi terhadap beberapa hal, karena Pansus menduga adanya penyimpangan dalam kasus pusat perbelanjaan ini," katanya. (dik)